

# Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Rongkop Gunungkidul

Leslie Retno Angeningsih/Suindarti  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD"  
Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp.0274 561971  
Email: [leslie.angeningsih@yahoo.com](mailto:leslie.angeningsih@yahoo.com)

## **Abstract**

*This study tries to find out factors causing the low level of women's role in development planning meetings (Musrenbang) and efforts which have been done to enhance women's participation in those forums. This research is conducted in Rongkop district, Gunungkidul regency, Yogyakarta province. The method used is descriptive qualitative. The data are collected using documentation, observation, and in-depth interview. The data analysis employs an inductive interpretative method. The findings of this study indicate that women's role in the committee is relatively high, but is low in the decision making process. These result from internal and external factors. The internal factors are women's lack of courage, self-esteem, and resources. The external factors are women's low level of attendance, and insufficient representation in Musrenbang and regulations and culture in which there is no equity between men and women. The efforts to enhance women's role in Musrenbang are by reviewing government policies and the commitment of stakeholders on women's representation in development planning, revitalizing women activists, and increasing women's self-reliance, mental and spiritual endurance, quality, confidence, and courage in using all accesses to improve women's status.*

**Keywords:** *development planning meeting, women participation*

## **Abstrak**

Penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peran perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode induktif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepanitiaan sudah cukup tinggi, namun dalam proses pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa rendahnya tingkat keberanian, tingkat kepercayaan diri, dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki perempuan. Faktor eksternal adalah rendahnya tingkat kehadiran, belum representatifnya perempuan yang hadir dalam musrenbang, adanya regulasi dan budaya yang kurang berpihak pada kaum perempuan. Upaya-upaya untuk peningkatan peran perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah melalui peninjauan ulang kebijakan pemerintah serta komitmen para pemangku kepentingan mengenai keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan, revitalisasi aktivis perempuan dan peningkatan kemandirian perempuan, ketahanan mental dan spiritual, peningkatan kualitas perempuan, meningkatkan rasa percaya diri dan kebe-

ranian perempuan dalam memanfaatkan segala peluang untuk peningkatan kedudukan perempuan.

**Kata-kata Kunci:** musyawarah perencanaan pembangunan, partisipasi perempuan.

## Pendahuluan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan sistem perencanaan pembangunan yang sangat penting dan dilakukan setiap tahun secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Dalam forum Musrenbang kecamatan, para peserta membahas daftar usulan pembangunan di wilayah kecamatan untuk kemudian dibahas pada Musrenbang tingkat kabupaten yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya (*Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang*, 2009).

Perempuan seyogyanya ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan pembuatan keputusan (Hutchinson, 2003). Meskipun banyak penelitian tentang demokrasi tapi sedikit pakar yang meneliti pemberdayaan perempuan dan keterwakilannya dalam legislatif (Lindberg, 2004). Sangat sedikit dijumpai penelitian empiris yang mengungkapkan hubungan antara demokrasi dan kesetaraan jender (Sekhon, 2006). Padahal demokrasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Gerrington, dkk. 2005), perdamaian dunia (Russett,

1993), hak-hak asasi manusia (Mitchell dan McCormick, 1988), dan pembangunan manusia (Przeworski, 2000). Sekhon (2006) menemukan di India misalnya, telah dilakukan upaya untuk mendorong partisipasi efektif perempuan dalam arena politik. Kesempatan luas diberikan kepada perempuan dengan menyediakan 33 persen kursi di pemerintahan desa. Namun demikian, itu dirasa tidak cukup, karena perempuan ternyata dibatasi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, seperti adanya harapan tradisional pada peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, kasta dan ketidaksetaraan kelas, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum atau undang-undang.

Beberapa penelitian terhadap usulan pembangunan di Indonesia, mayoritas berasal dari laki-laki dan sangat sedikit berasal dari perempuan. Penelitian Agus Wiyono (2005) di Kecamatan Lawean, Surakarta menunjukkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang kelurahan masih rendah. Tingkat keterlibatan perempuan dalam kepanitiaan dan kehadiran relatif kecil. Penelitian di Desa Akelamo menunjukkan adanya keterlibatan perempuan. Dari 96 peserta Musrenbang 43 diantaranya 44,79

persen. Perempuan telah memperoleh kesempatan menyumbangkan pemikiran atau gagasan pembangunan, namun karena jumlahnya yang masih tidak sebanding dengan laki-laki, maka perencanaan pembangunan yang dihasilkan kurang responsif jender. Di Makasar para aktivis jender menuntut diadakannya Musrenbang khusus perempuan, karena keterwakilan perempuan dalam penentuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan alokasi anggaran masih dianggap kurang. Padahal kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mayoritas berasal dari perempuan (Pananrang, 2008). Di Aceh, data menunjukkan bahwa pada setiap tingkatan Musrenbang jumlah peserta perempuan rata-rata di bawah 27 persen, bahkan di tingkat desa rata-rata hanya 5 persen. Dan yang paling memprihatinkan beberapa peserta belum mengetahui apa dan mengapa Musrenbang itu dilaksanakan, dan apa peran, tugas, dan tanggung jawab perempuan di dalam Musrenbang (*Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah*, 2010). Rendahnya peserta perempuan ditemui pula pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop pada tanggal 26 Februari 2009. Dari 94 total peserta, 69 laki-laki dan hanya 26 perempuan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mengapa peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang masih rendah? Selanjutnya, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan peran perempuan pada pelaksanaan

Musrenbang? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dan upaya pemberdayaan melalui forum Musrenbang.

Selama ini perumus atau pembuat kebijakan umumnya adalah kaum laki-laki, karena itu dampak kebijakan cenderung lebih menguntungkan pihak laki-laki. Proses tersebut terbentuk karena pola pikir patriarki. Menurut Patricia dan Hill, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan, dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit dibandingkan laki-laki (Ritzer, 2004).

Kesetaraan jender bukan berarti perempuan menjadi sama dengan laki-laki (Sadli, 2000). Gerring, dkk. (2005) menyatakan bahwa kesetaraan jender adalah konsep yang kompleks dan berdimensi ganda dan seperti variabel yang berbeda mendorong pada dimensi yang berbeda pula. Menurut Seguino (2007), kesetaraan jender diukur melalui tiga hal, yaitu: kemampuan, kesempatan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan adalah prasyarat untuk mencapai kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang memberi rasa aman (Sadli, 2000). Untuk itu perlu adanya transformasi sosial dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, kualitas dan kesetaraan jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui strategi pengarusutamaan jender dalam seluruh proses pembangunan Nasional (*Inpres No: 9 Tahun 2000*).

Demokratisasi merupakan alternatif dari proses transformasi sosial. Demokratisasi merupakan cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang kepada masyarakat untuk menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog, diskusi, aksi yang bertumpu di atas persamaan dan keadilan. Perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada lembaga pemerintahan dan pembuatan keputusan (Hutchinson, 2003). Artinya, peran perempuan dalam pembangunan harus ada pada seluruh proses pembangunan sejak dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

### Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterpretasi obyektif tentang fenomena-fenomena yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti (Moleong, 2000).

Unit analisis adalah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop pada tanggal 26 Februari 2009. Jumlah peserta Musrenbang 95 orang dan jumlah sampel sebanyak 20 orang terdiri dari unsur pejabat tingkat Kecamatan Rongkop 3 orang, pelaksana Musrenbang Kecamatan 3 orang, wakil peserta laki-laki 7 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induktif interpretatif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap fakta atau data empiris yang telah terkumpul berdasarkan logika teoritis (Surachmad, 1982).

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Rongkop merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 8.385,7 Ha. Topografi wilayah merupakan kawasan perbukitan. Sebagian besar tanah berupa tegalan seluas 3.222,6 Ha dan pekarangan seluas 585.0370 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 32.429 orang terdiri dari 16.076 laki-laki dan 16.353 perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 7.693 KK meliputi 6.820 KK laki-laki dan 873 KK perempuan. Sex ratio 97,8, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk 388 jiwa/km<sup>2</sup>. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. Tingkat pendidikan berdasarkan angka partisipasi sekolah penduduk perempuan usia 10 tahun keatas adalah 1.876 siswa, sedangkan laki-laki sebanyak 1.901 siswa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2008). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih lebih rendah partisipasinya dalam menempuh pendidikan formal dibandingkan laki-laki.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka untuk mewujudkan perencanaan yang partisipatif, di Kecamatan Rongkop setiap tahun dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan kecamatan melalui forum Musrenbang. Koordinasi perencanaan pembangunan diselenggarakan melalui 3 tahapan. Tahap awal dilakukan penggalan gagasan masyarakat di 100 pedukuhan. Hasil musyawarah pembangunan di tingkat pedukuhan selanjutnya dituangkan dalam daftar hasil penggalan gagasan masyarakat. Hasil penggalan gagasan dilaporkan ke tingkat desa untuk direkap. Daftar rekapitulasi dijadikan bahan pembahasan pada Musrenbang di tingkat desa. Hasil Musrenbang desa dilaporkan ke kecamatan untuk selanjutnya direkap dan menjadi materi pembahasan pada forum Musrenbang di tingkat kecamatan.

Peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop Tahun 2009 dapat diketahui dari hasil analisis tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang. Kegiatan pra Musrenbang Kecamatan Rongkop dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2009 menyangkut persiapan teknis, administratif maupun substantif untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbang. Dalam tahap persiapan ini ditunjuk 2 orang fasilitator yang berasal dari unsur aparat kecamatan dan wakil masyarakat. Penunjukan

berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah seluruh peserta pra Musrenbang dituturkan oleh Bapak Kardiyo, SIP:

*"Sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terlebih dahulu dilakukan kegiatan persiapan yaitu pra Musrenbang Kecamatan. Pada pelaksanaan pra Musrenbang telah ditunjuk dua orang fasilitator yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dari Desa Karangwuni. Penunjukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah yang dilakukan saat pra Musrenbang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan Musrenbang".*

Karena penunjukan dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penunjukan fasilitator tidak menghadapi masalah. Dalam tahap persiapan telah melibatkan perempuan. Hal ini dituturkan oleh ibu Purwatiningsih dari Desa Pucanganom:

*"Saya senang sekali karena salah satu fasilitator yang ditunjuk adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Rongkop. Kebetulan beliau kan seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap persiapan Musrenbang kecamatan sudah nampak adanya keterwakilan perempuan. Saya sangat bersyukur perempuan diberikan ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk duduk dikepanitiaan."*

Pada tahap persiapan kegiatan Musrenbang kecamatan menunjukkan adanya keadilan jender. Perempuan



diberi ruang untuk mengambil peran yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Makna-makna yang mendefinisikan perempuan sebagai makhluk feminim, lemah, serta tidak pantas untuk memimpin tidak lagi ditemui. Penunjukan kedua fasilitator perempuan dinilai sangat positif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Endang Sumpeni dari Desa Melikan:

*"Penunjukan kedua fasilitator tersebut menurut saya sangat tepat, karena kedua-duanya merupakan orang yang punya peran yang sangat strategis di Kecamatan Rongkop dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi."*

Kedua fasilitator mempunyai suatu keteladanan yang tinggi karena didukung dengan kecerdasan dan keberanian mereka. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Tuyono dari Desa Pucanganom sebagai berikut:

*"Kedua fasilitator pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop mempunyai kecerdasan dan keberanian yang cukup tinggi, karena mampu memimpin dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang dengan baik, saya merasa salut melihat kecerdasannya dalam mensikapi permasalahan yang muncul dengan penuh keberanian menawarkan alternatif untuk pemecahannya."*

Pernyataan serupa disampaikan oleh ibu Suwari dari Desa Petir sebagai berikut:

*"Fasilitatornya sangat menguasai betul materi yang dibahas, sehingga ketika muncul permasalahan, dengan cerdas memberikan alternatif untuk pemecahan masalah."*

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop pada tanggal 26 Pebruari 2009 berlangsung secara sistematis. Hal ini dituturkan oleh Bapak Muh Riyanto dari Desa Melikan:

*"Musrenbang di Kecamatan Rongkop telah dilakukan secara runtut, dari presentasi prioritas masalah yang ada di Kecamatan Rongkop, prioritas kebutuhan dari masing-masing desa, sampai dengan penetapan wakil kecamatan yang akan mengawal programnya ke forum Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pada forum Musrenbang Kabupaten. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun pada pelaksanaan diskusi kelompok belum semua peserta bisa ikut aktif dalam menyampaikan pendapatnya, terutama ibu-ibu."*

Ibu Heri Supriyatun atau Atun dari Desa Semugih menambahkan bahwa:

*"Menurut pendapat saya pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop tahun 2009 yang lalu betul-betul bisa dilakukan secara sistimatis, hanya sayangnya ibu-ibu masih kelihatan belum partisipatif, banyak ibu-ibu yang memilih untuk berdiam diri."*

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah sistimatis sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, jika dicermati lebih lanjut, pelaksanaan diskusi kelompok yang membahas prioritas usulan masing-masing bidang belum melibatkan partisipasi aktif perempuan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sukiyo dari Desa Melikan sebagai berikut:

*"Peran serta perempuan dalam diskusi kelompok belum nampak lo bu, perempuan yang ada di kelompok saya, lebih banyak diam, sehingga kelihatan kurang demokratis dalam diskusi yang dilaksanakan."*

Pernyataan tersebut dibenarkan juga oleh ibu Ngatini dari Desa Botodayaan.

*"Memang benar, peserta Musrenbang perempuan pada pelaksanaan diskusi kelompok lebih banyak yang memilih diam, karena materi diskusinya yang tidak menarik sebagian besar bersifat usulan fisik dan belum sepenuhnya mencerminkan adanya usulan yang berpihak pada perempuan."*

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa peran perempuan dalam diskusi kelompok masih rendah. Rendahnya peran perempuan disebabkan karena materi yang dibahas kurang menarik. Sebagian besar usulan berupa usulan fisik yang dianggap belum bersifat responsif gender. Dari 219 usulan yang diajukan dari Desa Botodayaan, Bohol, Pringombo. Melikan, Karangwuni, Semugih, Petir maupun dari Desa Pucanganom, ternyata hanya 20 usulan yang mengakomodir kebutuhan perempuan.

Faktor lain rendahnya peran perempuan adalah keterwakilan perempuan kurang representatif. Jumlah peserta perempuan yang hadir hanya 26 orang sedang laki-laki sebanyak 69 orang. Rendahnya tingkat kehadiran perempuan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri serta keberanian perempuan dalam menyampaikan aspirasi dan

pendapatnya pada forum musrenbang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. Sabarisman. M.si:

*"Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop, masih ditemui adanya sikap perempuan yang kurang partisipatif. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keberanian serta kepercayaan diri dari peserta Musrenbang itu sendiri."*

Ibu Asih Suprpti dari Desa Pringombo membenarkan pendapat tersebut:

*"Biasanya ibu-ibu yang hadir dalam Musrenbang Desa lebih sedikit dibanding bapak-bapak dan kurang didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai, dari mereka yang hadir biasanya kurang mempunyai keberanian untuk menyampaikan aspirasinya, karena merasa kurang mendapatkan dukungan dari kaumnya, disamping itu juga sangat dipengaruhi adanya budaya setempat."*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kehadiran perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif gender.

*Out put* dari pelaksanaan Musrenbang adalah Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Rongkop yang dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) wilayah Kecamatan Rongkop tahun 2010. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tersebut merupakan suatu dokumen penting untuk memberi gambaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunung-

kidul terkait dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Rongkop pada tahun 2010. Paska pelaksanaan Musrenbang, masing-masing perwakilan desa wajib mensosialisasikan daftar usulan rencana pembangunan tersebut ke masing-masing desa.

Apabila mencermati Daftar Usulan Rencana Pembangunan tahun 2010 yang merupakan salah satu *out put* dari musrenbang Kecamatan Rongkop tahun 2009, nampak jelas bahwa Daftar Usulan Rencana Pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya bisa mengakomodir kebutuhan seluruh komponen masyarakat termasuk kebutuhan perempuan. Hal itu disebabkan karena dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan di tingkat basis belum sepenuhnya melibatkan unsur perempuan. Dengan demikian usulan program dan kegiatan terkait dengan upaya penyelesaian masalah perempuan, baik menyangkut bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan, kesehatan pertanian, maupun infrastruktur, yang dampaknya bisa memberi manfaat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan perempuan di semua aspek pembangunan, belum bisa dimunculkan dalam pembahasan pada Musrenbang desa. Karena tidak muncul dalam hasil rekapitulasi Musrenbang tingkat desa, maka secara otomatis tidak muncul dan dibahas pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 3 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai sektor kehidupan dan pembangunan. Dengan pengarusutamaan gender diharapkan perempuan mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan.

Pada Musrenbang Kecamatan Rongkop, perempuan telah didudukkan setara dengan laki-laki dan diberi peluang berpartisipasi di forum. Perempuan sendiri mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecerdasan dan keberanian untuk menjadi pemimpin serta memanfaatkan peluang dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal itu dinyatakan oleh Bapak Sunarno dari Desa Pringombo sebagai berikut:

*“Kenyataan membuktikan bahwa meskipun fasilitator tersebut berasal dari unsur perempuan, tetapi ternyata memiliki kemampuan, kecerdasan serta keberanian yang cukup tinggi. Hal tersebut nampak jelas dari bagaimana cara fasilitator menjawab serta memberikan penjelasan serta tanggapan yang disampaikan oleh peserta pra mu-*



*srenbang. Fasilitator tersebut selalu memberikan jawaban yang tegas dan ketika harus memberikan alasan, alasan yang disampaikanpun sangat mendasar sekali."*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa teori jender dan subordinasi yang memandang perempuan irasional atau emosional sehingga tidak mampu tampil sebagai pemimpin, tidak terjadi dalam tahap persiapan Musrenbang. Namun dalam proses pengambilan keputusan pada forum diskusi kelompok, kondisi yang terjadi sangat berbeda. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan ternyata masih rendah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugiyarto, Spd dari Desa Semugih:

*"Perempuan masih kurang keberaniannya bahkan kurang percaya diri apalagi untuk duduk setara dengan laki-laki, karena merasa kurang mendapatkan dukungan dari kaumnya. Aspirasi mereka kadang-kadang kurang didengar karena jumlah mereka yang sedikit, ditambah lagi dengan masih adanya kecenderungan dari peserta laki-laki yang masih menitik beratkan pada pembangunan yang bersifat fisik tanpa mempertimbangkan aspek jender didalamnya."*

Bapak Mujiyakno dari Desa Botodayaan menambahkan sebagai berikut:

*"Jumlah peserta Musrenbang yang hadir dari delapan desa hanya delapan orang itupun mewakili organisasi PKK Desa."*

Ibu Rusiyem dari Desa Pucanganom menyatakan sebagai berikut :

*"Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop, masih ditemui adanya sikap perempuan yang kurang partisipatif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya keberanian dan kepercayaan diri perempuan tersebut karena tidak didukung sepenuhnya oleh SDM yang memadai dan adanya faktor budaya yang kurang berpihak pada perempuan. Sehingga mereka memilih untuk diam dan tidak mau menyampaikan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan."*

Kurangnya keberanian dalam menyampaikan aspirasi karena merasa kurang mendapat dukungan dari kaumnya telah membawa perempuan pada posisi yang sulit. Kepentingan perempuan tidak terakomodir dan partisipasi mereka dinilai rendah. Kondisi ini membenarkan teori tentang jender dan *stereotype* yang menimbulkan ketidakadilan jender.

Masyarakat bukanlah hanya sekadar konsumen pembangunan, tapi subyek dari pembangunan (Pranowo, 2009). Untuk menghapus *stereotype* jender, perempuan harus melakukan reposisi dari sasaran pembangunan menjadi perencanaan pembangunan. Perempuan harus mampu mendorong diri sendiri untuk memperoleh akses terhadap proses perencanaan pembangunan termasuk didalamnya pengambilan keputusan. Disamping itu perlu dilakukan revitalisasi aktivis perempuan agar sadar, paham dan tahu bagaimana memerankan diri dalam Musrenbang.

Berdasarkan analisis di atas, nampak jelas bahwa hasil penelitian masih

mendukung temuan Lindberg (2004), Gerring dkk. (2005), serta Hutckinson (2003). Bahkan peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop mendukung sebagian dari hasil penelitian Agus Wiyono (2005) yaitu peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada forum Musrenbang masih rendah. Namun dalam kepanitiaan keterlibatan perempuan cukup tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Desa Akelamo, yang memiliki jumlah peserta Musrenbang perempuan jauh lebih kecil dibandingkan di Akelamo. Terdapat inkonsistensi hasil seperti yang dilakukan oleh Sekhon (2006).

## Simpulan

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Rongkop tahun 2009 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/003 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2009. Dalam kepanitiaan peran perempuan sudah cukup tinggi. Dalam proses pengambilan keputusan peran perempuan masih rendah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti rendahnya tingkat keberanian, tingkat kepercayaan diri, dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki perempuan. Faktor eksternal berupa rendahnya tingkat kehadiran, belum representatifnya perempuan yang hadir dalam Musrenbang,

adanya regulasi dan budaya yang kurang berpihak pada kaum perempuan.

Upaya-upaya untuk peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang yaitu melalui peninjauan ulang kebijakan serta komitmen para pemangku kepentingan mengenai keterwakilan perempuan dalam musrenbang. Pentingnya revitalisasi aktivis perempuan dan peningkatan kemandirian perempuan, ketahanan mental dan spiritual, peningkatan kualitas perempuan, menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan memacu keberanian perempuan untuk selalu memanfaatkan segala peluang guna peningkatan kedudukan perempuan itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul*. 2008. Kecamatan Dalam Angka.
- Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP)*. 2010. Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.
- Gerring, J., Bond, P., Barndt, WT., and Moreno, L. 2005. Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective. *World Polit.* 27. 3: 323-364.
- Hutchinson, Janet. R. 2003. En-Gendering Democracy. *Administrative Theory & Praxis*. Vol. 24. No. 4: 721-738.
- Inpres No 9 Tahun 2000*, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

- Lindberg, Staffan. 2004. Women's Empowerment and Democratization: The Effects of Electoral Systems, Participation, and Experience in Africa. *Studies in Comparative International Development*. Spring. Vol. 39. No. 1:28-53.
- Mitchell, NJ., and McCormick, JM. 1988. Economic and Political Explanations of Human Rights Violations. *World Polit.* 40. 4: 475-498.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan XVIII. Bandung: PT. Remaja.
- Pananrang, Riandy Aqsa. 2008. [Aktivis Gender Juga Mau Musrenbang Perempuan](http://www.tribun-timur.com/view.php?id=65294&jenis=Makassar). Tribun. <http://www.tribun-timur.com/view.php?id=65294&jenis=Makassar>
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Kecamatan.
- Pranowo, Dian. 2009. Model Penguatan Peran Perempuan Di Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang) Dalam Rangka Pembangunan Desa Responsif Gender. Retrived 28 Agustus. Surakarta. <http://www.scribd.com/doc/19169482/Model-Penguatan-Peran-Perempuan>
- Przeworski, A. 2000. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World. 1950-1990*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Russett, BM. 1993. *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World*. Princeton: Princeton University Press.
- Sadli, Saparinah. 2000. *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif HAM: dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Seguino, S. 2007. Plus Ça Change? Evidence on Global Trends in Gender Norms and Stereotype. *Fem Econ.* 13. 2:1-28.
- Sekhon, Joti. 2006. Engendering Grassroots Democracy: Research, Training, and Networking for Women in Local Self-Governance in India. *NSWA Journal*. Vol. 18. No. 2. Summer: 101-123.
- Surachmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian, Metode dan Teknik*. Bandung: Transito.
- Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah. 2010. Saatnya Perempuan Terlibat Aktif dalam Pembangunan. 10 Mei. Interaksi Intimedia. <http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrikKesra&berita=130547&pagecomment=1>